

DEMOCRATIC CITIZENSHIP DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA BARU: SURVEI PADA PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN, FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Slamet Subekti
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275
email: slametsubekti01@gmail.com

Abstract

This paper discusses how the new students' perspectives in relation to the Democratic Citizenship based on survey was conducted to 100 students of the Fisheries Resource Utilization Studies Program, Faculty of Fisheries and Marine Science, Diponegoro University. The survey noted that students generally confirms the character of good citizens exercise their rights and obligations. They have a positive response to the issue of gender equality, and political participation is included in the student organization. However, the students expressing a lack of trust in the state institutions, and criticized that the Government has yet to implement its responsibilities optimally. In turn, potential students as young intellectuals need to be empowered in order to strengthening the democratic process in Indonesia.

Key words: Democratic Citizenship, Students of Fisheries Resource Utilization Studies Program Faculty of Fisheries and Marine Science Diponegoro University

Abstrak

Paper ini membahas tentang perspektif mahasiswa baru dalam kaitan dengan Democratic Citizenship berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada 100 mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Hasil survei mencatat bahwa mahasiswa pada umumnya meneguhkan karakter warganegara yang baik dengan melaksanakan hak dan kewajibannya. Mereka memiliki respon positif terhadap isu kesetaraan gender, dan partisipasi politik termasuk dalam organisasi kemahasiswaan. Akan tetapi, mahasiswa mengungkapkan kurangnya rasa percaya kepada lembaga-lembaga negara, dan mengkritisi bahwa Pemerintah belum melaksanakan tanggungjawabnya secara optimal. Pada gilirannya, potensi mahasiswa sebagai intelektual muda perlu diberdayakan dalam rangka penguatan proses demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Kewarganegaraan Demokratis, Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

I. PENGANTAR

Kajian tentang *Democratic Citizenship* (Kewarganegaraan Demokratis) ini bertolak dari keinginan untuk mengetahui persepsi mahasiswa sebagai golongan intelektual muda terhadap kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan itu, penulis melakukan survei longitudinal pada 25 Oktober 2013 dan 8 Januari 2014 dengan melibatkan 100 responden mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro yang sedang mengikuti matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada survei pertama dibagikan kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan opini mahasiswa dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi: karakter warga negara yang baik, tanggungjawab pemerintah, rasa percaya pada lembaga-lembaga pemerintah dan kebanggaan pada simbol-simbol negara, kesetaraan perempuan, partisipasi politik dan organisasi kemahasiswaan di kampus. Kuesioner ini memuat 50 butir pertanyaan tertutup.

Survei tahap kedua dibagikan kuesioner terhadap responden yang sama untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang isu-isu HAM, pelaksanaan demokrasi, gerakan reformasi, kemauan untuk menjadi pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, dan pandangan terhadap organisasi kemahasiswaan di kampus. Kuesioner kedua ini memuat lima butir pertanyaan terbuka. Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi persentase. Selanjutnya, data hasil survei disajikan dalam pembahasan analitis dan sintesis.

Pembahasan artikel ini dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan kunci berikut ini: Apakah *Democratic Citizenship* (Kewarganegaraan Demokratis) itu? Mengapa mahasiswa dijadikan fokus penelitian? Bagaimana peran mahasiswa dalam proses Demokrasi?

II. ETOS KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

Democratic Citizenship atau Kewarganegaraan Demokratis merupakan suatu etos atau karakter warganegara dengan kemampuan dan kemauan secara aktif untuk mempengaruhi berfungsinya lembaga-lembaga negara. Upaya pengembangan karakter utama seperti jujur, integritas, dan bertanggung-jawab ini bermanfaat dalam rangka proses menjadi warganegara yang baik. Sehubungan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengembangkan baik kemampuan teknis tentang perundang-undangan dan jalannya pemerintahan maupun kemauan untuk peduli dan membantu sesama. Mahasiswa praktis dilatih untuk menganalisis akar penyebab masalah ketidak-adilan sosial, ekonomi, dan politik sebagai sarana penguatan demokrasi (Joel Westheimer, t.t.; simak juga Judith Tourney-Purta et.al., 2004).

Sebagai referensi dalam konteks Kanada misalnya, Joel Westheimer dan Joe Kahne mengidentifikasi adanya tiga visi tentang warganegara dewasa yang baik sebagai pijakan Pendidikan Kewarganegaraan untuk memandu: (1) Warganegara bertanggungjawab secara personal; (2) Warganegara yang berpartisipasi; dan (3) Warganegara yang berorientasi pada keadilan. Visi pertama, mengembangkan karakter warganegara agar bertanggungjawab secara personal dengan penekanan pada kejujuran, integritas, disiplin-diri, dan kerja keras. Visi kedua, mendorong warganegara agar berpartisipasi aktif dalam persoalan *civic* dan kehidupan sosial dalam masyarakat pada tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Visi ketiga, mewujudkan ideal warganegara yang baik melalui penggunaan perspektif keadilan dalam menilai secara kritis struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi serta mengeksplorasi strategi untuk perubahan yang diarahkan pada akar penyebab masalah (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Visi Warganegara Dewasa yang Baik

Tanggungjawab Personal	Partisipasi	Orientasi Keadilan
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak secara bertanggungjawab dalam masyarakat Bekerja dan membayar pajak Mengelola sampah, 	<ul style="list-style-type: none"> Mengakui arti pentingnya partisipasi Mengorganisasi usaha sosial masyarakat, memajukan perkembangan ekonomi, menjaga 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai secara kritis struktur sosial, politik, dan ekonomi Mengeksplorasi strategi untuk perubahan yang diarahkan pada akar

mendaur-ulang, dan donor darah • Membantu sesama, memberi pertolongan di saat krisis • Mentaati hukum.	lingkungan hidup • Mengetahui bekerjanya badan-badan pemerintahan • Mengetahui strategi untuk mengerjakan tugas kolektif.	penyebab masalah • Mengetahui gerakan sosial dan dampak perubahan sistemik • Mencari tahu dan memperhatikan berbagai bidang ketidak-adilan.
--	---	---

Sumber: Joel Westheimer, *Citizenship Education for a Democratic Society*, Canadian Heritage.

Senada dengan pandangan Joel Westheimer dan Joe Kahne tersebut, John Webster Gastil dalam tesis doktoralnya pada University of Wisconsin—Madison (1994) menyimpulkan bahwa Kewarganegaraan Demokratis mengandaikan tiga etos, yaitu: (1) keputusan politik; (2) komunikasi politik; dan (3) tindakan politik. Keputusan politik merupakan sikap demokratis warganegara yang memiliki inisiatif, menghormati sesama warga, rasa komitmen dan tanggungjawab, serta kesediaan berbagi dan mendukung orang lain. Komunikasi politik mengungkapkan perilaku demokratis warganegara yang secara teratur terlibat dalam percaturan politik serta musyawarah dengan sesama warga dalam rangka memperluas perspektif penilaian secara tepat, empatik, dan reflektif. Tindakan politik mengacu pada keterlibatan warganegara dalam konflik –di luar ranah wacana— dalam dunia politik; berupa aksi voting, lobi, maupun demonstrasi.

Definisi Kewarganegaraan Demokratis dengan demikian mengacu pada teori demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini mengandaikan proses pengambilan keputusan inklusif yang memberikan kesempatan bagi warganegara untuk membangun agenda politik sehingga mencapai keputusan politik yang bermakna. Proses demokrasi ideal membutuhkan warganegara yang mengambil keputusan politik, saling berkomunikasi di antara mereka, dan terlibat dalam aksi politik yang berlangsung secara individual maupun kelompok.

III. POTENSI MAHASISWA SEBAGAI KELAS MENENGAH TERDIDIK

Mahasiswa sekarang ini hanya memerlukan kurang dari satu dekade untuk menyelesaikan studinya, setelah lulus mereka akan menjadi bagian dari kelas menengah terdidik yang memiliki peran strategis. Peran kelas menengah terdidik

untuk memperkenalkan akal sehat dalam dunia demokrasi. Mereka berperan mendekatkan jurang pemisah antara demokrasi dan nilai-nilai keadaban dan kesejahteraan politik (simak Masdar Hilmy, *Kompas* 24 Januari 2014).

Pemberdayaan kelas menengah terdidik dalam proses-proses demokrasi di Indonesia tampak menonjol. Dewasa ini, pusaran politik dikuasai oleh kelas menengah terdidik, tetapi terjadi paradoks dan anomali demokrasi. Fakta menunjukkan bahwa sebagian kelas menengah terdidik yang menduduki jabatan strategis di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, pimpinan BUMN maupun pimpinan partai politik terlibat korupsi. Fenomena menarik bahwa sekarang wacana *trias politika* telah bergeser menjadi *trias koruptika*.

Mahasiswa baru sekarang ini berada pada posisi satu generasi di bawah kelas menengah terdidik yang sekarang memegang kekuasaan politik tetapi korup. Mereka diharapkan dapat menjadi intelektual yang memiliki integritas moral karena komitmen kebangsaan dan kemanusiaan, serta religiusitas yang tinggi. Harapan ke depan di tangan para mahasiswa sekarang jalannya demokrasi bukan lagi sekedar rutinitas politik tanpa makna (*business as usual*) dipenuhi kamuflase prosedural, melainkan terjadi peningkatan signifikan dalam kematangan dan kualitasnya.

IV. MENAKAR PERAN MAHASISWA DALAM PROSES DEMOKRASI

Perspektif mahasiswa baru berkenaan dengan Kewarganegaraan Demokratis ini dimungkinkan terbentuk dari pembelajaran literasi politik di kampus, sehingga mengatasi apatisme politik di kalangan mahasiswa. Matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya mengemban misi untuk meneguhkan kesadaran mahasiswa akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara di alam demokrasi. Mahasiswa khususnya sebagai intelektual muda dengan bekal cukup pengetahuan diharapkan senantiasa berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan demokrasi pada jalur sebenarnya (bandingkan dengan hasil *Survei IFES*, 2010).

Berikut ini disajikan hasil survei yang coba menjaring persepsi mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Angkatan 2013/2014,

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro berkenaan dengan keputusan, partisipasi dan tindakan politiknya dalam rangka Kewarganegaraan Demokratis (lihat Lampiran 1).

1. Mendeskripsikan Karakter Warganegara Baik

Hampir seluruh mahasiswa meneguhkan arti pentingnya menjadi warganegara yang baik dengan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Kriteria warganegara yang baik di sini termasuk memberikan suara dalam Pemilu menurut sebagian besar (96%) responden ini penting, sementara 4% berpendapat hal itu agak tidak penting. Bergabung atau menjadi anggota Parpol menurut 42% responden penting, 52% menyatakan agak tidak penting, dan 6% berpendapat sangat tidak penting. Menurut pendapat 96% responden bahwa mengetahui sejarah nasional itu penting, sementara 3% menyatakan agak tidak penting, dan 1% berpendapat sangat tidak penting. Mengikuti isu politik di surat kabar, radio dan TV itu penting menurut 72% responden, sementara 18% menyatakan agak tidak penting, dan 10% berpendapat sangat tidak penting.

Respek kepada wakil Pemerintah itu penting menurut 79% responden, sementara 18% menyatakan agak tidak penting, 2% berpendapat itu sangat tidak penting, dan 1 responden tidak memberikan jawaban. Keterlibatan dalam diskusi-diskusi politik menurut 65% responden penting, sementara 32% menyatakan agak tidak penting, 2% berpendapat sangat tidak penting, dan 1 responden tidak memberikan jawaban. Berpartisipasi dalam protes damai melawan hukum yang tidak adil menurut 89% responden penting, sementara 11% menganggap tindakan itu agak tidak penting.

Berpartisipasi dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat menurut 98% responden penting, sementara 2% berpendapat agak tidak penting. Mengambil bagian dalam aktivitas yang memajukan HAM menurut 95% responden penting, sementara 3% menyatakan agak tidak penting, dan 2% berpendapat sangat tidak penting. Mengambil bagian dalam aktivitas untuk melindungi lingkungan hidup menurut 98% responden penting, sementara 2% beranggapan itu agak tidak penting.

2. Mengkritisi Tanggungjawab/Kewajiban Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk menunaikan tanggungjawabnya memenuhi hak-hak dasar warganegara ini mendapat penekanan khusus dalam perspektif hampir semua mahasiswa. Tentu hal ini beralasan karena sebagian besar mahasiswa merasakan langsung kehidupan masyarakat di lingkungannya, mereka menuntut agar Pemerintah serius dalam menangani masalah-masalah sosial ekonomi. Pemerintah dituntut untuk bekerja serius dalam rangka mensejahterakan dan melindungi warganegaranya.

Pemerintah dipandang wajib menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga menurut 96% responden, sementara 2% berpendapat mungkin tidak wajib, dan 2% menyatakan tidak wajib. Pemerintah wajib menyediakan standar hidup layak bagi warga lanjut usia menurut 96% responden, sementara 4% menyatakan agak tidak wajib. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan gratis bagi semua warga menurut 90% responden, sementara 7% menyatakan agak tidak wajib, dan 3% berpendapat sangat tidak wajib.

Pemerintah wajib menjamin kesempatan politik yang sama bagi laki-laki dan perempuan menurut 81% responden, sementara 7% menyatakan mungkin wajib, dan 2% berpendapat sangat tidak wajib. Pemerintah wajib mengendalikan polusi lingkungan hidup menurut 87% responden, dan 13% berpendapat mungkin wajib. Pemerintah wajib menjamin perdamaian dan ketertiban dalam negeri menurut 91% responden, dan 9% menyatakan mungkin wajib.

Pemerintah wajib memajukan perilaku jujur dan bermoral di antara warganegara menurut 94% responden, dan 6% berpendapat mungkin wajib. Pemerintah wajib menjamin pekerjaan bagi setiap warga yang menginginkannya menurut 68% responden, sementara 28% berpendapat mungkin wajib, 2% menyatakan mungkin tidak wajib, dan 2% menganggap tidak wajib. Pemerintah wajib mengendalikan harga-harga menurut 73% responden, sementara 28% menyatakan mungkin wajib, 5% berpendapat mungkin tidak wajib, dan 2% menganggap tidak wajib.

Pemerintah wajib menyediakan industri-industri dengan dukungan yang diperlukan untuk berkembang menurut 67% responden, sementara 28% berpendapat mungkin wajib, 4% menyatakan mungkin tidak wajib, dan 1 responden tidak memberikan jawaban. Pemerintah wajib menyediakan standar hidup layak bagi pengangguran menurut 61% responden, sementara 19 berpendapat mungkin wajib, 12% menganggap mungkin tidak wajib, 7% menyatakan tidak wajib, dan 1 responden tidak memberikan jawaban. Pemerintah wajib mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan di antara warga negara menurut 68% responden, sementara 22% menyatakan mungkin wajib, 5 % menganggap mungkin tidak wajib, dan 6% berpendapat tidak wajib.

3. Mengukur Kepercayaan pada Lembaga Negara

Sebagian besar mahasiswa mengungkapkan rendahnya kepercayaan mereka terhadap berbagai Lembaga Negara (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) ini dapat dipahami sebagai respon negatif atas keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam kasus korupsi. Sejumlah kecil (13%) responden selalu percaya pada lembaga Pemerintah nasional, 40% sering percaya, 39% jarang percaya, dan 8% tidak pernah percaya. Sekitar 9% responden selalu percaya pada Pemerintah kota/kabupaten, 31% sering percaya, 53% jarang percaya, dan 7% tidak pernah percaya. Hanya 5% responden yang selalu percaya pada Pengadilan, 29% sering percaya, 54% jarang percaya, dan 12% tidak pernah percaya.

Sebagian kecil (6%) responden yang selalu percaya pada Polisi, sementara 26% sering percaya, 59% jarang percaya, dan 9% tidak pernah percaya. Sangat sedikit (2%) responden yang selalu percaya pada Partai politik, sedangkan 17% sering percaya, 56% jarang percaya, dan 25% tidak pernah percaya. Hanya sekitar 6% responden yang selalu percaya pada DPR nasional, sementara 9% sering percaya, 69% jarang percaya, dan 16% tidak pernah percaya.

Namun demikian, sebagian besar mahasiswa memberikan respon positif terhadap simbol-simbol Negara, paham nasionalisme dan semangat patriotisme. Sebagian besar (73%) responden menyatakan sangat setuju bahwa bendera negara sangat berarti bagi dirinya, dan 25% setuju, sementara 2% menganggap tidak

setuju. Sebagian besar (85%) responden menyatakan sangat setuju bahwa dia sangat mencintai Indonesia, dan 15% menyatakan setuju. Hampir setengah (42%) responden menyatakan bahwa Indonesia harus bangga dengan prestasi mereka, dan 50% menyatakan setuju, sementara 7% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Sebagian kecil (20%) responden yang menyatakan senang tinggal di negara lain, sementara 34% tidak senang, dan 46% sangat tidak senang.

Sikap sebagian besar mahasiswa menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap keberadaan para imigran untuk mendapatkan hak-hak asasinya di Indonesia. Sebagian besar (67%) responden bersikap setuju bahwa imigran diberi kesempatan untuk mempertahankan bahasanya, sementara 33% tidak setuju. Delapanpuluh lima persen responden menyatakan sikap setuju bahwa anak-anak para imigran mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan anak WNI, sementara 15% tidak setuju. Sebagian besar (66%) responden setuju bahwa imigran yang telah bermukim beberapa tahun mendapatkan hak suara dalam Pemilu, sementara 34% tidak setuju. Enampuluh persen responden setuju bahwa imigran diberikan kesempatan untuk memelihara adat-istiadat dan gaya hidupnya, sementara 40% tidak setuju. Enampuluh dua persen responden menyatakan setuju bahwa imigran mempunyai hak-hak yang sama dengan WNI, sementara 38% tidak setuju.

4. Respon terhadap Kesetaraan Perempuan

Sikap positif mahasiswa ditunjukkan dalam menanggapi kesetaraan gender. Enampuluh tiga persen responden bersikap setuju bahwa perempuan menjadi PNS dan mengambil bagian dalam Pemerintahan seperti laki-laki, sedangkan 37% tidak setuju. Tujuh puluh empat persen responden setuju bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal, sedangkan 26% tidak setuju. Delapanpuluh tiga persen responden menyatakan sikap setuju bahwa laki-laki dan perempuan mendapat gaji sama besarnya apabila pekerjaan mereka sama, sedangkan 17% tidak setuju.

Akan tetapi, terdapat sikap ambivalen sebagian besar mahasiswa ketika merespon positif peran politik perempuan, tetapi mereka memberikan penilaian

negatif terhadap kapasitas profesional perempuan. Duapuluh enam persen responden setuju bahwa perempuan harus menjauhi politik, sedangkan 73% tidak setuju. Enampuluh delapan persen responden setuju bahwa laki-laki lebih berhak bekerja daripada perempuan apabila pekerjaan langka, sedangkan 32% tidak setuju. Limapuluh tujuh persen responden menyatakan setuju bahwa laki-laki lebih baik kualifikasinya untuk menjadi pemimpin politik daripada perempuan, sedangkan 43% tidak setuju.

5. Partisipasi Politik dan Organisasi Kemahasiswaan

Keputusan sebagian besar mahasiswa yang didasarkan pertimbangan rasional untuk partisipasi politik menunjukkan keterlibatan aktif. Ini tampak pada persentase keinginan yang pasti dari 60% responden untuk bergabung/menjadi anggota Parpol, dan 40% tidak pasti. Pandangan mahasiswa terhadap pers sebagai pilar demokrasi ditunjukkan oleh 75% responden akan menulis surat pembaca berkaitan dengan bidang sosial/politik, sedangkan 15% tidak. Minat mahasiswa untuk masuk dalam birokrasi cukup besar seperti ditunjukkan oleh 88% responden yang menyatakan pilihannya untuk menjadi PNS di kota/kabupaten, sedangkan 12% tidak.

Sebagian besar mahasiswa mempunyai persepsi positif terhadap organisasi kemahasiswaan di kampus. Hal ini ditunjukkan oleh 93% responden menyatakan setuju bahwa pemilihan pengurus BEM/HMJ dapat memperbaiki kondisi kampus, sedangkan 7% tidak. Sembilanpuluh delapan persen responden setuju bahwa banyak perubahan positif yang terjadi di kampus apabila mahasiswa bekerjasama, sedangkan 2% tidak setuju. Sembilanpuluh delapan persen responden setuju bahwa organisasi kemahasiswaan dapat menyatakan pendapat untuk memecahkan masalah di kampus, sedangkan 2% tidak. Sembilanpuluh tiga persen responden setuju bahwa aksi mahasiswa secara bersama-sama (daripada aksi individual) akan berpengaruh lebih besar terhadap apa yang terjadi di kampus, sedangkan 7% tidak setuju.

V. SIMPULAN

Mahasiswa baru Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro pada umumnya memiliki perspektif yang luas berkenaan dengan Kewarganegaraan Demokratis. Mahasiswa cenderung mengutamakan karakter baik dan kesadaran tinggi untuk partisipasi politik termasuk dalam organisasi kemahasiswaan. Mereka memiliki kebanggaan sebagai anak bangsa, dan merespon positif atas kesetaraan gender. Namun demikian, mahasiswa menyisakan penilaian negatif sebagaimana ditunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, dan mengkritisi tanggungjawab/kewajiban Pemerintah yang belum dipenuhi secara optimal. Akhirnya, potensi mahasiswa sebagai intelektual muda perlu diberdayakan dalam rangka penguatan proses demokrasi di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Basic Principles of Active Democracy, brochure of the “Europe for Citizens” Programme of the European Commission, Sofia: Association for European Partnership.

Fogelman, Ken. 2003. “Education for Democratic Citizenship in Schools” dalam ***Education, Autonomy, and Democratic Citizenship: Philosophy in a Changing World***, diedit David Bridges, London: Taylor & Francis e-Library. Master e-book ISBN 0-203-44277-6

“From Client to Citizens? Emerging Citizenship in Democratising Indonesia” Proyek Penelitian (2012-2016) Kerjasama antara KITLV, Universitas Gadjah Mada, University of Amsterdam dan Leuven University. Proyek ini didanai oleh KNAW. Informasi lebih lanjut: Berenscot@kitlv.nl

Gastil, John Webster. 1994. “Democratic Citizenship & the National Issues Forum” thesis doktor Communication Arts pada University of Wisconsin—Madison.

Hilmy, Masdar. “Banalitas Demokrasi Kita” artikel dalam ***Kompas***, 24 Januari 2014.

Survei IFES tentang Sikap Politik Masyarakat Indonesia Mengungkapkan Kepuasan terhadap Demokrasi dan Kekurangannya Informasi Politik, for immediate release September 30, 2010, Washington: International Foundation for Electoral Systems. Dapat diakses pada www.IFES.org

Tourney-Purta, Judith dan Jo-Ann Amadeo. 2004. ***Strengthening Democracy in the America through Civic Education: An Empirical Analysis Highlighting the Views of Students and Teachers***, Washington: Organization of American States – Unit for Social Development and Education. Dapat diakses pada <http://www.oas.org/udse>

Westheimer, Joel. “Citizenship Education for a Democratic Society” dalam ***CEDS TeachMag***, Ottawa: Canadian Heritage.

Why Study Civics? Adaptasi dari <http://edufire.com/content/articles/409-civics-in-our-lives>

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Angkatan 2013/2014 Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro –meliputi kelas A di bawah koordinasi Lucy Pratitis Sejati (NIM 26010313120028) dan kelas B di bawah koordinasi Andika Wiratama (NIM 26010313140084)—atas kesediaannya menjadi responden survei *Democratic Citizenship* (2013/2014).

Lampiran 1. Persentase Respon Mahasiswa Program Studi PSP 2013/2014 FPIK Universitas Diponegoro tentang Democratic Citizenship

Pernyataan	Sangat tak penting/wajib/setuju (%)	Agak tak penting/wajib (%)	Agak penting/wajib (%)	Sangat penting/wajib/setuju (%)
1. Warga negara dewasa yang baik				
memberikan suara dalam Pemilu	0	4	10	86
2. Bergabung/ menjadi anggota Parpol	6	52	40	2
3. Mengetahui sejarah nasional	1	3	12	84
4. Mengikuti isu politik di surat kabar, radio, TV	10	18	46	26
5. Menunjukkan respek kepada wakil Pemerintah	2	18	40	39
*)	2	32	50	15
6. Terlibat dalam diskusi-diskusi politik *)	0	11	22	67
7. Berpartisipasi dalam protes damai melawan hukum yang tidak adil	0	2	12	86
8. Berpartisipasi dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat	2	3	47	48
9. Mengambil bagian dalam aktivitas yang memajukan HAM	0	2	29	69
10. Mengambil bagian dalam aktivitas untuk melindungi lingkungan hidup				
11. Pemerintah bertanggungjawab				
menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga	2	2	4	92
12. Menyediakan standar hidup layak bagi warga lanjut usia	0	4	10	86
13. Menyediakan pendidikan gratis bagi semua warga	3	7	23	67
14. Menjamin kesamaan kesempatan politik bagi laki-laki dan perempuan	2	7	29	52
15. Mengendalikan polusi lingkungan hidup	0	0	13	87
16. Menjamin perdamaian dan ketertiban dalam negeri	0	0	9	91
17. Memajukan perilaku jujur dan bermoral di antara warga negara	0	0	6	94
18. Menjamin pekerjaan bagi setiap warga yang menginginkannya	2	2	28	68
*)	2	5	20	73
19. Mengendalikan harga-harga	0	4	28	67
20. Menyediakan industri-industri dengan dukungan yang diperlukan untuk berkembang	7	12	19	61

*)				
21. Menyediakan standar hidup layak bagi pengangguran	6	5	22	68
*)				
22. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan di antara warga negara				
23. Percaya pada lembaga	8	39	40	13
Pemerintah nasional	7	53	31	9
24. Pemerintah kota/ kabupaten	12	54	29	5
25. Pengadilan	9	59	26	6
26. Polisi	25	56	17	2
27. Partai politik	16	69	9	6
28. DPR nasional				
29. Bendera negara sangat berarti bagi saya	0	2	25	73
30. Saya sangat mencintai Indonesia	0	0	15	85
31. Indonesia seharusnya bangga dengan prestasi saya	1	7	50	42
32. Saya akan lebih senang tinggal di negara lain	46	34	13	7
33. Imigran seharusnya diberi kesempatan untuk mempertahankan bahasanya	7	26	49	18
34. Anak-anak dari migran harus mendapat kesempatan pendidikan yang sama anak-anak WNI	2	13	67	18
35. Imigran yang telah bermukim beberapa tahun seharusnya mempunyai hak suara dalam Pemilu	8	26	52	14
36. Imigran seharusnya diberi kesempatan untuk memelihara adat-istiadat dan gaya hidupnya	10	30	49	11
37. Imigran seharusnya mempunyai hak-hak yang sama dengan WNI	8	30	49	13
38. Perempuan seharusnya menjadi PNS dan mengambil bagian dalam Pemerintahan seperti halnya laki-laki.	3	34	52	11
39. Perempuan seharusnya mempunyai hak-hak yang sama seperti laki-laki dalam berbagai hal	4	22	46	28
40. Perempuan seharusnya menjauhi politik	23	51	18	8
41. Apabila pekerjaan langka, maka laki-laki lebih berhak bekerja daripada perempuan	10	22	35	33
42. Laki-laki dan perempuan harus digaji sama besarnya apabila pekerjaan mereka sama	0	17	34	49
43. Laki-laki lebih baik kualifikasinya untuk menjadi pemimpin politik daripada perempuan	8	35	30	27
44. Keinginan anda untuk bergabung/ menjadi anggota Parpol	19	21	60	0
45. Menulis surat pembaca berkaitan dengan bidang sosial/ politik	8	17	64	11
46. Menjadi PNS di kota/ kabupaten	5	7	60	28

47. Pemilihan pengurus BEM/ HMJ disarankan dapat memperbaiki kondisi kampus	3	4	25	68
48. Banyak perubahan positif yang terjadi di kampus apabila mahasiswa bekerjasama	0	2	28	70
49. Organisasi kemahasiswaan dapat menyatakan pendapat untuk memecahkan masalah di kampus	0	2	34	64
50. Aksi mahasiswa secara bersama- sama akan berpengaruh lebih besar terhadap apa yang terjadi di kampus daripada aksi mahasiswa sendiri-sendiri.	2	5	45	48

*) Satu responden tidak memberikan jawaban.

Keterangan:
N = 100.